

## SINOPSIS

Salah satu indikator makmur atau tidaknya sebuah negara salah satunya dilihat dari ketahanan pangan nasionalnya, Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan potensial lahannya yang sangat berlimpah, namun permasalahan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang semakin tidak terkendali lagi ini tentunya menjadi permasalahan di Kabupaten Sleman. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana peran pemerintah secara umum dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan khususnya dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mengingat yang paling berkepentingan dengan lahan pertanian adalah SKPD ini.

Dalam Penelitian ini metode yang Peneliti pakai adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini ingin mengetahui tentang Peran Dinas Pertanian Kabupaten Sleman dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian objeknya di Kabupaten Sleman tepatnya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara langsung pada obyek penelitian dengan daftar pertanyaan kepada responden. Keabsahan data kami uji memakai triangulasi yang melihat kesesuaian antara hasil wawancara dan data yang di olah sebagai penunjuk efektivitas dari program yang di lakukan oleh SKPD ini dalam upayanya menjaga lahan pertanian agar laju peralihannya dapat di kendalikan secara berkesinambungan.

Upaya Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan yang pertama adalah menetapkan tata kelola perijinan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Perijinan alih fungsi lahan pertanian bersifat lintas sektoral dan melibatkan 7 SKPD yang kemudian di sebut tim 7, kedua adalah peningkatan produktivitas hasil panen pertanian dilakukan melalui bantuan benih, pupuk, dan lain-lain. ketiga adalah melakukan program atau pemberian sertifikasi gratis kepada para petani yang memiliki lahan pertanian produktif dengan melakukan koordinasi dengan BPN dalam mengeluarkan sertipikat tersebut tentunya melalui rekomendasi dan peninjauan dari dinas pertanian. Yang ke empat adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan. Pembinaan dilakukan melalui UPT Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K), yang di tempatkan di tiap rata-rata dua Kecamatan.

Dalam penelitian ini Peneliti berkesimpulan bahwa Peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam mengendalikan alih fungsi lahan belum cukup efektif, tentunya masih banyak kendala dan juga faktor-faktor yang yang menjadi bahan perbaikan bagi Dinas ini dan juga SKPD lain yang terlibat dalam pengendalian peralihan fungsi lahan yang demikian masif terjadi di Kabupaten Sleman karena mengingat Sleman merupakan kawasan konservatif yang meski harus di jaga kelestariannya.